

REVIEW OF INDONESIAN AND MALAYSIAN AFFAIRS

VOLUME 18

SUMMER 1984

published by

The Department of Indonesian and Malayan Studies
The University of Sydney

in cooperation with

The Documentation Centre for Modern Indonesia
Royal Institute for Linguistics and Anthropology
The Netherlands

ISSN 0034 - 6594

Editorial Committee:

Anthony Day (Editor, Australia)
Cees van Dijk (Editor, the Netherlands)
Rudy de Jongh (Reviews Editor)
John Drabble
B. Joseph
Michael van Langenberg
Thea van Lennep
A.C. Milner
Anthony Reid
Martin Rudner
Marcus Susanto

Subscriptions:

\$15 per year
Cheques payable to The Accountant, The University
of Sydney

Subscriptions and Manuscripts to:

The Editor, RIMA, Department of Indonesian and
Malayan Studies, The University of Sydney, N.S.W.
2006, Australia.

Manuscripts should be submitted typed, double-spaced.
Footnotes should be numbered consecutively throughout
and presented typed and double-spaced on separate
sheets at the end of the manuscript. Footnote and
bibliography style follows that of the Bijdragen tot
de Taal-, Land-, en Volkenkunde. Some examples from
BKI 137, 1981:

p. 279: ... and the Muslim port towns (see
Noorduyn 1978: 244-253, esp. note 36).

p.291: Noorduyn, J.
1978 "Majapahit in the Fifteenth
Century," BKI 134, pp.207-274.

Poerbatjaraka, R.M.Ng
1940 Pandji-verhalen Onderling
Vergeleken, Bibliotheca
Javanica 9, Bandung.

Back issues of RIMA are available on application.

CONTENTS

'Kiri' dan 'Kanan' Dalam Sastra Indonesia 1984	Ariel Heryanto	1
Sastra 'dan' Politik	Ariel Heryanto	6
Muhammad Bakir - A Batavian Scribe and Author in the Nineteenth Century	Henri Chambert-Loir	44
When is a Text not a Text? The <u>Malat</u> and Philology	Adrian Vickers	73
Variation in a Malay Folk-Tale Tradition	I. Proudfoot	87
The Concept of a 'Work' in Bugis Manuscripts	C.C. Macknight	103
Syair Abdul Muluk Dalam Pementasan: Sebuah Informasi	Nafron Hasjim	115

Major Political Developments in Indonesia
in the Second Half of 1983 and the First
Half of 1984: The Nahdatul Ulama
Prepares for a National Congress Cees van Dijk 131

Book Reviews

- Van der Molen Javaanse Tekstkritiek: een
overzicht en nieuwe benadering
geïllustreerd aan de Kunjara-
karna.
(R. Rubinstein) 158
- King Interest Groups and Political
Linkage in Indonesia 1800-1965
(M. van Langenberg) 163
- Bonneff et. al. Pantjasila: Trente Années de
Debats Politiques en Indonésie
(A. Nagazumi) 165

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

Henri Chambert-Loir is Indonesian correspondent for the
Ecole Francaise de l'Extreme Orient.

Ariel Heryanto is a prize-winning author who teaches at
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

C.C. Macknight is a Reader in the Department of
History, A.N.U..

Nafron Hasjim is a linguist attached to the Pusat
Bahasa, Jakarta.

I. Proudfoot lectures in the Faculty of Asian Studies,
A.N.U..

Adrian Vickers is currently completing his Ph.D. in the
Department of Indonesian and Malayan Studies,
University of Sydney.

'KIRI' DAN 'KANAN' DALAM SASTRA INDONESIA 1984

oleh: Ariel Heryanto

Catatan ini dibuat sekedar sebagai pengantar untuk tulisan "Sastra 'dan' Politik" yang diterbitkan dalam jurnal RIMA nomor ini. Semoga pengantar ini bisa memberikan gambaran selintas tentang beberapa peristiwa penting dalam kesusasteraan Indonesia pada tahun 1984 serta kedudukan tulisan "Sastra 'dan Politik" tersebut di atas.

Untuk memahami apa-apa yang terjadi dalam kesusasteraan Indonesia pada tahun 1984, kita perlu (betapa pun sedikitnya) memahami apa-apa yang terjadi sebelumnya. Kita beruntung karena telah ada dua ahli tentang kesusasteraan Indonesia modern dari Australia yang telah menyumbangkan hasil penelitian dan pandangannya tentang kesusasteraan Indonesia sebelum tahun 1984. Keith Foulcher membahas "Indonesian Literature 1950 - 1965: The Left Response" dalam the Fifth National Conference of the Asian Studies Association of Australia, May 13 - 19 1984 di Adelaide University. Walau pokok bahasan Foulcher tentang kesusasteraan Indonesia pada tahun-tahun 1950 - 1965, ia memberikan gambaran hubungan antara apa yang terjadi pada tahun-tahun itu dengan apa-apa yang terjadi dalam kesusasteraan Indonesia pada awal dekade ini. Kesusasteraan Indonesia pada tahun-tahun 1980 - 1982 merupakan pokok utama penelitian David T. Hill, yang kemudian diterbitkan oleh Centre of Southeast Asian Studies, Monash University dalam bentuk working paper no. 33, berjudul "Who's Left? Indonesian Literature in the Early 1980's".

Jika Foulcher menunjukkan dampak kehancuran sastra 'kiri' dan kejayaan sastra 'kanan' di Indonesia sejak tahun 1965/1966 hingga awal dekade ini, David T. Hill secara khusus mempelajari munculnya kembali pemikiran tentang kesusasteraan yang ke 'kiri'- 'kiri'-an pada awal tahun-tahun 1980an (hingga pertengahan 1984). Sebenarnya ada serangkaian peristiwa penting dalam kesusasteraan Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1984, yaitu setelah Foulcher dan Hill

menyelesaikan tulisan mereka masing-masing. Rangkaian peristiwa tersebut berpusat pada keterbukaan perdebatan antara apa yang disebut pandangan sastra 'kiri' dan 'kanan' di Indonesia oleh orang-orang Indonesia yang sebelumnya sudah dimulai secara agak diam-diam.

Persoalan sastra 'kiri' dan 'kanan' yang belakangan ini mulai dilontarkan secara terbuka pada akhir bulan Oktober 1984 di Jawa Tengah. Pada tanggal 26-27 Oktober 1984 diselenggarakan Simposium Nasional Sastra Indonesia Modern di Yogyakarta oleh Fakultas Sastra dan Pusat Penelitian Kebudayaan, keduanya milik Universitas Gajah Mada. Beberapa belas jam setelah berakhirnya pertemuan itu, 28 - 29 Oktober 1984 di Surakarta (atau Solo) diselenggarakan Sarasehan Kesenian oleh sekelompok anak muda (dipimpin oleh Halim H.D.) yang nampaknya tak terikat pada suatu lembaga formal secara jelas. Karena kedua pertemuan itu bersambungan waktunya, maka banyak dari peserta simposium nasional di Yogyakarta berkemungkinan ikut hadir dalam sarasehan di Surakarta. Karena dekatnya waktu penyelenggaraan itu orang-orang juga tertarik untuk membuat perbandingan-perbandingan di antara kedua pertemuan itu. Seakan-akan keduanya sedang bersaing, atau tepatnya: seakan-akan yang kedua hendak menantang atau menyaingi yang pertama. Hal ini dibantah oleh pihak penyelenggara pertemuan kedua.

Perbandingan yang dibuat para pengamat sastra atas kedua pertemuan itu bahkan cenderung menjadi (apa yang oleh Arief Budiman disebut sebagai) "polarisasi". Ada cukup banyak perbedaan kontras di antara kedua pertemuan tersebut, dan hal ini dipertajam oleh beberapa pemberitaan dan ulasan di media massa (kadang-kadang secara berlebihan). Saya akan menyebutkan beberapa contoh perbedaan itu. Pertama-tama tentang penyelenggaraannya. Pertemuan di Yogyakarta diadakan oleh lembaga perguruan tinggi terkemuka milik negara. Pertemuan itu mendapat dana yang cukup besar untuk mengundang beberapa ratus peserta, serta undangan khusus dari berbagai tempat di Indonesia (bahkan ada undangan dari Malaysia). Para tamu undangan ini mendapatkan pelayanan makan-tidur yang sangat baik. Pertemuan di Surakarta diadakan sekelompok anak muda bermodalkan semangat besar dan dibantu dana sekedarnya dari dua lembaga kebudayaan/kesenian setempat. Panitia pertemuan di Surakarta tak mampu menyediakan sedikit

pun honorarium untuk pembicara, atau ongkos jalan serta makan dan tidur bagi siapa saja yang datang ke pertemuan yang diadakan di lantai bertikar tanpa kursi itu. Gedung tempat berlangsungnya pertemuan di Yogyakarta dijaga petugas keamanan untuk membatasi peserta (tamu undangan dan khalayak umum yang telah membayar). Gedung pertemuan di Surakarta terbuka untuk siapa saja, masuk-keluar kapan saja, tanpa bayar.

Perbandingan di antara kedua pertemuan juga dapat diamati dari macam perhatian para pembicaranya. Dibandingkan dengan pertemuan di Surakarta, pembicaraan dalam pertemuan di Yogyakarta lebih banyak berupa perdebatan-perdebatan ilmiah tentang metode-metode pendekatan kesusasteraan (istilah-istilah 'strukturalisme', 'semiotik', atau 'philologi' menjadi penting). Pembicaraan di Surakarta mempersoalkan masalah-masalah yang dianggap mendasar dalam penciptaan karya sastra dalam konteks masyarakat Indonesia serta hubungannya dengan komitmen sosial. Perbedaan warna utama dalam pembicaraan di kedua pertemuan itu terungkap dengan jelas dalam dua laporan yang ditulis oleh dua pembicara dari dua pertemuan itu di koran Kompas. Umar Junus menulis tentang "Membuka Era Baru Penelitian Sastra" (Kompas, 16 November 1984) sebagai komentar atas simposium yang diikutinya di Yogyakarta. Arief Budiman menulis tentang "Sastra Kiri yang 'Kere'" (Kompas, 23 November 1984), sebagai komentar atas pertemuan di Surakarta. Sebetulnya ada overlapping dalam pembicaraan di kedua pertemuan, sehingga perbedaannya tidak tanpa perkecualian. Beberapa pembicara di Yogyakarta (misalnya Goenawan Mohamad dan Ashadi Siregar) mempunyai pandangan yang cukup sejalan dengan pandangan kebanyakan pembicara di Surakarta. Bahkan Umar Kayam, yang menjadi salah satu penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan simposium di Yogyakarta, menyatakan sikap kritisnya pada beberapa pembicaraan dalam pertemuan itu yang terlalu mengunggulkan teori-teori ilmiah.

Perbedaan yang saya anggap paling menarik di antara kedua pertemuan itu ialah dalam hal pembicara. Tidak satu pun pembicara dalam simposium di Yogyakarta menjadi pembicara sarasehan di Surakarta, dan demikian juga sebaliknya. Mungkin hal ini hanya karena tidak adanya orang yang mau kerepotan mempersiapkan dua pembicaraan dalam waktu yang berdekatan. Tetapi ada

persoalan yang tetap menarik untuk dipertanyakan: mengapa penyelenggara pada satu pertemuan memilih orang-orang tertentu untuk diundang menjadi pembicara, dan mengapa orang-orang tertentu memilih menjadi pembicara dalam pertemuan yang satu dan bukan yang lain? Hal ini saya sebutkan mengingat terbatasnya dunia sastra Indonesia moderen dan relatif sedikitnya pembicara (terkemuka) yang tersedia, juga adanya kecenderungan untuk mengundang pembicara-pembicara yang sama dalam berbagai pertemuan, serta kecenderungan beberapa cendekiawan Indonesia untuk berbicara tentang hal-hal yang kurang-lebih sama dalam beberapa pertemuan yang hampir berdekatan waktunya. Tidak hadirnya Arief Budiman dalam pertemuan di Yogyakarta (dan kehadirannya di Surakarta sebagai pembicara) nampaknya sempat membuat hati beberapa orang jadi kecut. Menurut pengakuan Arief sendiri, ia akan senang kalau bisa hadir dalam pertemuan di Yogyakarta (untuk jumpa kawan-kawan lama), tapi ia berhalangan.

Perbedaan-perbedaan itu sudah tercium beberapa pihak bahkan sebelum pertemuan di Yogyakarta dimulai. Pada awal simposium di Yogyakarta, pembicara Darmanto Jatman mulai mengungkit-ungkit persoalan sastra 'kiri' untuk pertemuan di Surakarta, dan sastra 'kanan' untuk pertemuan di Yogyakarta itu. Setelah itu persoalan 'kiri' dan 'kanan' menjadi semakin seru di beberapa media massa dan di luar forum pertemuan formal. Persoalan 'keterlibatan sosial' dalam kesusasteraan yang menjadi perbincangan inti di Surakarta dan beberapa pembicara di Yogyakarta oleh Abdul Hadi WM (Berita Buana, 6 Nopember 1984) disebut sebagai "slogan-slogan yang pernah diserukan oleh seniman-seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat PKI)", dan orang yang mengatakan bahwa sastra Indonesia mutakhir berurusan dengan kelas menengah saja oleh Abdul Hadi dituduh sebagai orang yang "bersimpati pada sastra yang bercorak Marxis-Leninis ala Lekra". Ingatan orang Indonesia tentunya belum bebas dari pengalaman tahun-tahun 1966 dan sesudahnya: hanya karena dianggap 'terlibat PKI' seseorang bisa dibunuh beramai-ramai.

Setelah menulis "Sastra Kiri yang 'Kere'" di harian Kompas, Arief Budiman mendapat berbagai ejekan secara bertubi-tubi dari beberapa teman dekatnya di Jakarta ketika disana diselenggarakan Temu Kritikus Sastra oleh Dewan Kesenian Jakarta (dengan beberapa

pembicara yang juga menjadi pembicara di Yogyakarta dan tak satu pun yang dari Surakarta). Agaknya banyak pihak (disengaja atau tidak) telah menafsirkan secara kurang cermat ucapan-ucapan Arief Budiman, termasuk pendapatnya bahwa kita (di Indonesia) jangan takut dicap Komunis atau Lekra hanya karena kita memperjuangkan keadilan sosial dan kepentingan rakyat jelata. Menurut Arief, perjuangan itu bukan monopoli PKI atau Lekra.

Perdebatan 'kiri' dan 'kanan' sastra Indonesia mutakhir masih menjadi bagain yang tidak kecil dalam Temu Redaktur Budaya seJawa dan Temu Sastrawan se Jawa Tengah, 21 - 22 Desember 1984 di Semarang. Rektor Universitas Diponegoro yang menjadi pelindung panitia pertemuan itu pada upacara pembukaan berpesan agar perbedaan paham (maksudnya 'kiri' dan 'kanan') dalam pembahasan sastra Indonesia tidak dipertajam. Beberapa menit setelah Rektor itu turun dari podium, Arief Budiman tampil sebagai pembicara pertama dalam pertemuan itu. Arief Budiman mengawali pembicaraannya dengan menyatakan bahwa ia tidak sependapat dengan Rektor itu. Menurut Arief Budiman perbedaan pendipertajam. Menurut Arief, kehidupan sastra Indonesia terasa lebih sehat pada akhir masa Orde Lama, justru karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Menurut Arief pula, belakangan ini sastra Indonesia menjadi lesu karena pandangan tentang sastra yang kini ada tidak mempunyai lawan berdebat. Dalam pertemuan yang sama Arief menjelaskan kesalah-pahaman yang belakangan ini dia alami. Apa yang dimaksudkan pertanyaan apa-apa yang sudah mapan. Jadi 'kiri' tidak dengan sendirinya harus diartikan Komunis, PKI, atau Lekra.

Beberapa pihak (termasuk seorang tokoh yang pernah terlibat secara langsung dalam pertarungan gagasan kesusasteraan Indonesia sebelum bangkitnya Orde Baru, dan seorang asing yang telah menjadi salah satu ahli paling terkemuka tentang Indonesia) pernah berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang terurai di atas, yang juga menjadi pokok perhatian dalam tulisan "Sastra 'dan' Politik" sudah basi. Lepas dari persoalan apakah kita menyetujui pendapat ini atau tidak, persoalan 'komitmen sosial' dan kaitannya dengan 'sastra' tetap menjadi bagian yang penting dalam banyak pembicaraan para pengamat sastra mutakhir di Indonesia pada (khususnya akhir) tahun 1984.